RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

2025-2030

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025-2029.

Penyusunan Rencana Strategis ini merupakan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 Kabupaten Kepulauan Selayar. Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan dapat menjadi pedoman, informasi dan alat dalam mengimplementasikan program-program kerja strategis untuk lima tahun kedepan serta menjadi tolak ukur dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra ini masih jauh dari sempurna, sehingga kami mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak demi penyempurnaan dan perbaikan Renstra ini.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029.

Benteng, 25 September 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA,



ANDI TRIYANTI MUSDALIFAH, SE., M.M
Pangkat : Pembina
NIP.19780520 200604 2 036

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **iii**

DAFTAR TABEL ..... **v**

DAFTAR GAMBAR ..... **vi**

DAFTAR LAMPIRAN XXV ..... **vii**

BAB I Pendahuluan

1.1.Latar Belakang 1

1.2.Landasan Hukum 5

1.3. Maksud dan Tujuan 10

1.4. Sistematika Penulisan 11

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis BKPSDM

2.1. Gambaran Pelayanan

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKPSDM... 14

2.1.2. Sumber Daya BKPSDM 20

2.1.3. Kinerja Pelayanan BKPSDM 22

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKPSDM 35

2.1.5. Kelompok Sasaran Pelayanan BKPSDM 36

2.1.6. Mitra BKPSDM dalam Pemberian Pelayanan 37

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan BKPSDM 40

2.2.1. Penentuan Isu-Isu Strategis 44

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKPSDM..... 51

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah BKPSDM .. 54

BAB IV Program, Kegiatan, SubKetgiatan dan KinerjPenyelenggaraan Bidang Urusan

4.1. Rencana Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Pendanaan . 60

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 99

BAB V Penutup

Penutup 103

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1. Klasifikasi Pegawai Menurut Golongan..... 20
TABEL 2.2. Klasifikasi Pegawai Menurut Jabatan..... 21
TABEL 2.3. Klasifikasi Pegawai Menurut Kualifikasi Pendidikan..... 21
TABEL 2.4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2020-2024.... 24
TABEL 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan 25
TABEL 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan 30
TABEL 2.7. Permasalahan-Permasalahan Pelayanan BKPSDM..... 42
TABEL 2.8. Isu Strategis BKPSDM..... 48
TABEL 3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis BKPSDM 53
TABEL 3.2. Kebijakan BKPSDM 57
TABEL 3.3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan..... 58
TABEL 3.4. Penahapan BKPSDM 59
TABEL 4.1. Program/Kegiatan/SubKegiatan BKPSDM 62
TABEL 4.2. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan BKPSDM..... 79
TABEL 4.3. Daftar SubKegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 95
TABEL 4.4. Indikator Kinerja Utama BKPSDM 101
TABEL 4.5. Indikator Kinerja Kunci BKPSDM..... 102

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1. Struktur Organisasi BKPSDM 19

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN XXV. Pemetaan Visi, Misi, Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih viii

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Otonomi Daerah dan tuntutan reformasi memberikan tantangan dalam melakukan perubahan terhadap penataan landasan dan kebijakan serta program-program yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Hakekat pelaksanaan otonomi daerah adalah bergesernya paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat sentralistik ke desentralistik. Sehubungan dengan itu, maka setiap organisasi dituntut untuk melakukan pengelolaan secara tepat guna menghadapi perubahan lingkungan strategis yang terjadi.

Perubahan lingkungan strategis di era reformasi menyebabkan tugas Aparatur Pemerintah di daerah semakin tinggi dan kompleks. Menghadapi hal tersebut, maka Pemerintah Daerah harus menyiapkan Sumber Daya Aparatur yang memiliki kemampuan/kompetensi, kualitas, profesionalitas, dan kompetitif sesuai dengan perkembangan zaman.

Sebagai upaya dalam mewujudkan tuntutan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menjelaskan bahwa manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin PNS akan diproses/ditindak lanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai dengan tingkat dan jenis hukuman disiplin.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang manajemen kepegawaian, mengembang fungsi sebagai perumus kebijakan di bidang kepegawaian yang diharapkan dapat menciptakan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara yang memiliki kemampuan/kompetensi, kualitas, profesionalitas, dan kompetitif serta mampu mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih (Clean Government) dan pemerintahan yang baik (Good Governance).

Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (Clean Government), hal yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana menjamin bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan telah berlangsung sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga dapat mewujudkan suatu pemerintahan yang baik diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil dan manfaat serta dampak yang dihasilkan sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektifitas.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam ketiga Peraturan Perundang-Undangan tersebut, dijelaskan bahwa penyusunana RPJMD didasarkan pada penjabaran visi-misi kepala daerah. Selanjutnya RPJMD menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yang di dalamnya memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, program-program pembangunan dan

kegiatan pokok pembangunan kurun waktu 5 (Lima) tahun mendatang.

Renstra Perangkat Daerah adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Adapun fungsi Renstra yaitu sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikator program dan kegiatan dengan jangka waktu 5 (Lima) tahun.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah unsur Perangkat Daerah pembantu Kepala Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan manajemen ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajeman Pegawai Negeri Sipil. Sejalan dengan pelaksanaan strategi penataan manajeman sumber daya manusia aparatur yang profesional dan berkompeten dijabarkan dalam 4 (empat) program/kegiatan prioritas, salah satunya yaitu Penguatan Implementasi Manajeman ASN yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB. Strategi tersebut diatas kemudian diselenggarakan oleh Kantor Regonal IV Badan Kepegawaian Negara (Kanreg IV BKN) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsi pemerintahan dalam urusan kepegawaian. Demikian pula dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam urusan pengembangan sumber daya manusia. Keterkaitan Renstra BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Renstra K/L

dan provinsi yaitu pentingnya peranan sumber daya manusia aparatur dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Keterkaitan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah merupakan wujud konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan Renstra juga sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah sesuai dengan sasaran yang diharapkan dengan tepat menurut kebutuhan dan perubahan.

Keberadaan Renstra BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengacu pada RPJMD. Tujuan, sasaran program dan kegiatan dalam Renstra BKPSDM memiliki keselarasan dengan program dan kegiatan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar. Penyusunan rencana kegiatan tahunan BKPSDM berpedoman pada Renstra BKPSDM sekaligus menjadi tolak ukur penilaian pencapaian keberhasilan BKPSDM.

Dalam pelaksanaannya, BKPSDM menyelenggarakan 3 (Tiga) Program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan daerah, termasuk kegiatan-kegiatan seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan tugas dan pemeliharaan aset daerah. Program Kepegawaian Daerah mencakup tentang penyelenggaraan tata kelola kepegawaian berdasarkan peraturan tentang manajemen aparatur sipil negara. Sedangkan Program Pengembangan Sumber Daya

Manusia mencakup penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berbasis pada tugas pokok dan fungsi, pelaksanaan manajemen talenta, serta pengembangan pola karir aparatur sipil negara yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi pegawai.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomorr 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7077)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4889);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941):
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 sebagaimana tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembanguanan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 135);
32. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud dari Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Maksud penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2030 adalah :

a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan 5 (Lima) tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2030;
b. Menyediakan arah dan prioritas pembangunan bidang kepegawaian agar pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDM lebih terarah, efektif dan efisien.

1.3.2. Tujuan dari Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tujuan penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2030, adalah :

a. tersedianya dokumen yang dapat digunakan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk mengarahkan dan

mengalokasikan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan Perangkat Daerah;

b. memudahkan pengukuran pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
c. memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang menjadi kerangka dasar bagi Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan; dan
d. meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar bidang dalam Perangkat Daerah;
e. sebagai acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah;
f. menjabarkan visi, misi dan program RPJMD ke dalam tujuan, sasaran, strategi dana rah kebijakan serta program pada Perangkat Daerah;
g. menyelaraskan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2030 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan penyusunan Renstra yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BKPSDM

Bab ini merupakan bagian yang menjelaskan dan menyajikan tentang peran (tugas dan fungsi) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra. Selain itu dalam Bab ini mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BKPSDM dan Penentuan Isu-isu Strategis BKPSDM.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran BKPSDM untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun kedepan. Bab ini juga merupakan bagian yang menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi yang dipilih.

BAB IV KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini mengemukakan indikator kinerja BKPSDM yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (Lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2030.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan Kepala Badan BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai penanggung jawab pelaksanaan Renstra BKPSDM bersama Bappelitbangda melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra BKPSDM, keterlibatan *stakeholder* pembangunan dalam pelaksanaan Renstra BKPSDM Tahun 2025-2030.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

2.1. Gambaran Pelayanan

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar.

Susunan organisasi serta tugas dan fugsi Badan Kepegawaian dan Pengembanagn Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan fungsi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembanagn sumber daya manusia;
d. Pelaksanaan administrasi Badan;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Tugas Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan fungsi Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah :

a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
b. Pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
e. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

❖ **Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum**

Tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum adalah membantu Sekretaris melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah

tangga, asset serta pengelolaan kepegawaian dan Perundang-undangan.

- **Kepala Subbagian Program**

  Tugas Kepala Subbagian Program adalah membantu Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja.

- **Kepala Subbagian Keuangan**

  Tugas Kepala Subbagian Keuangan adalah membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.

3. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian

Tugas Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian adalah membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian dan fungsi Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian adalah :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
d. Pelaksanaan administrasi di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;

e. Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan

Tugas Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan adalah membantu Kepala Badan daalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang mutasi, prmosi, penilaian kinerja dan penghargaan dan fungsi Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan adalah :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang mutasi, promosi, penilaian kinerja dan penghargan;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang mutasi, promosi, penilaian kinerja dan penghargan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang mutasi, promosi, penilaian kinerja dan penghargan;
d. Pelaksanaan administrasi di bidang mutasi, promosi, penilaian kinerja dan penghargan;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur

Tugas Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur adalah membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengambangan sumber daya manusia aparatur dan fungsi Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur adalah :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan kompetensi aparatur;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan kompetensi aparatur;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi aparatur;
d. Pelaksanaan administrasi di bidang pengembangan kompetensi aparatur;
e. Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

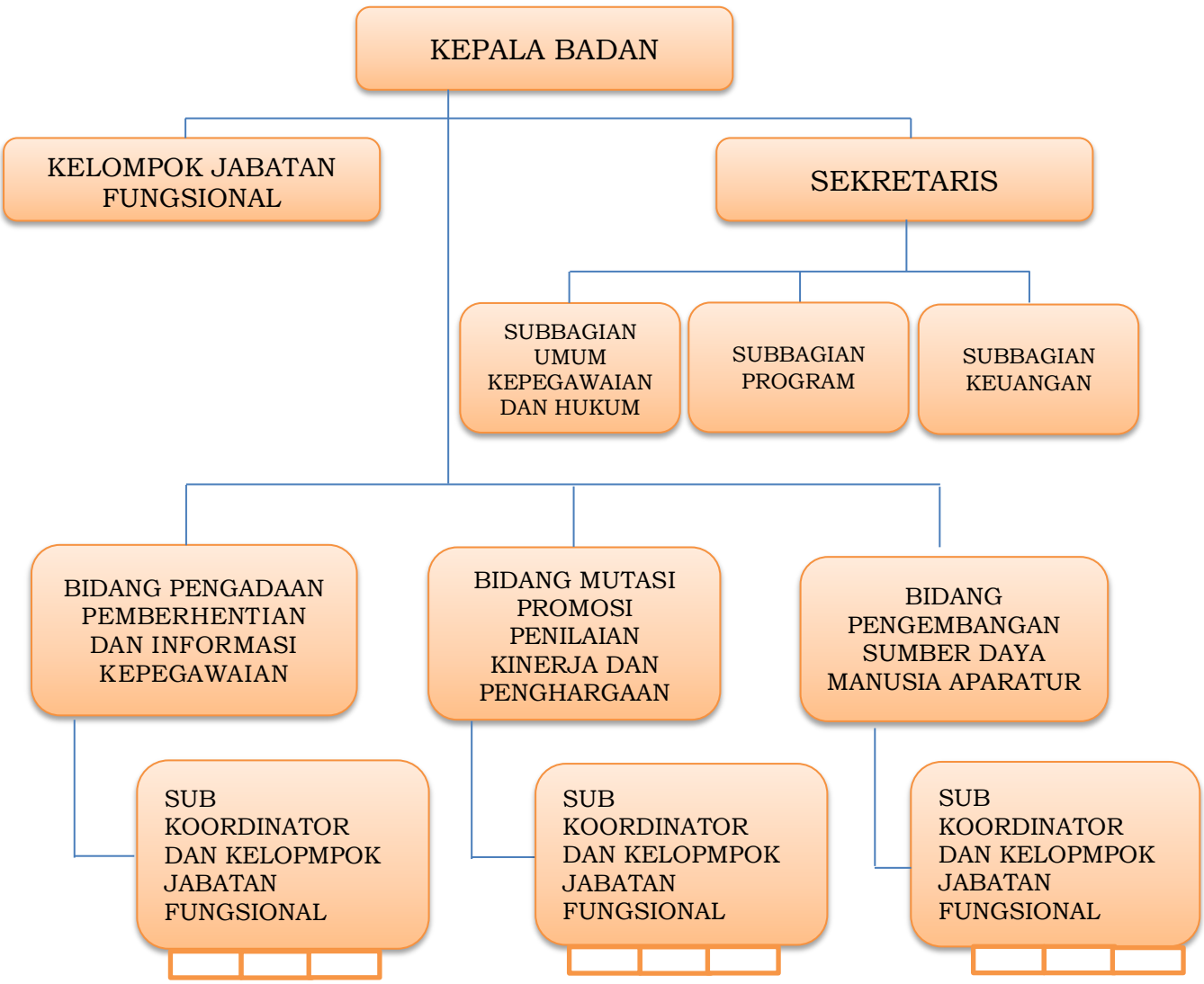
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri dari :

a. Kepala Badan
b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Hukum;
    2. Sub Bagian Program;
    3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
d. Bidang Mutasi, Promoso, Penilaian Kinerja dan Penghargaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam bentuk bagan, Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Gambar 2.1

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



2.1.2 Sumber Daya Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai 67 orang yang terdiri dari 42 orang yang berstatus ASN dan 25 orang yang berstatus Non ASN, dengan kualifikasi menurut golongan/ruang, jabatan, dan kualifikasi pendidikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Klasifikasi Pegawai Menurut Golongan

Golongan/Ruang	Jumlah
Golongan IV/a	3 orang
Golongan III/d	12 orang
Golongan III/c	3 orang
Golongan III/b	5 orang
Golongan III/a	10 orang
Golongan II/d	3 orang
Golongan II/c	3 orang
PPPK	3 orang
Kontrak Daerah	25 orang
Total	**67 orang**

Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar didominasi Level Manajerial yakni sebanyak 62,68%, sementara Non ASN sebesar 37,31% pada Tahun 2024.

Tabel 2.2
Klasifikasi Pegawai Menurut Jabatan

Jabatan	Jumlah
Eselon II/B	1 orang
Eselon III/B	3 orang
Eselon IV/A	3 orang
Fungsional	14 orang
Staf PNS	18 orang
Staf PPPK	3 orang
Staf Non ASN	25 orang
Total	**67 orang**

Tabel 2.3
Klasifikasi Pegawai Menurut Pendidikan

Pendidikan	Jumlah
Strata 2 (S2)	8 orang
Strata 1 (S1)	37 orang
Sarjana Muda	4 orang
SMA	18 orang
Total	**67 orang**

Pada tabel tersebut di atas terlihat bahwa sebagian besar pegawai pada lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki kualifikasi pendidikan sarjana (S1). Hal ini menunjukkan bahwa kualifikasi sumber daya aparatur di lingkup ini sudah memadai.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan tupoksi adalah mengurus administrasi kepegawaian di Daerah dengan Sistem dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Perundang – Undangan yang meliputi :

1. Bezzeting Pegawai;
2. Administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai;
3. Persyaratan Mutasi/Perpindahan Pegawai;
4. Pengurusan Ijin Belajar;
5. Pengurusan Tugas Belajar;
6. Prosedur Pengajuan Kartu Pegawai;
7. Penerbitan Kartu Suami Istri;
8. Administrasi Pengajuan Cuti;
9. Pemberian Penghargaan/Reward Dan Sanksi/Punishment;
10. Pengurusan Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Ijasah;
11. Administrasi Pensiun.

Target kinerja pelayanan di atas kemudian diselaraskan ke dalam 3 (tiga) Program yang dilaksanakan oleh BKPSDM sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program ini memuat kegiatan-kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Administrasi, Pengadaan/Penyediaan, Pemeliharaan dan Evaluasi Kinerja penunjang urusan

pemerintahan daerah dengan tolak ukur dan target kinerja pelayanan meningkatnya nilai SAKIP.

2. Program Kepegawaian Daerah

Program ini memuat kegiatan-kegiatan yang menjabarkan tentang ruang lingkup manajemen ASN, antara lain Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian serta mutasi dan promosi ASN yang menjadi indikator kinerja utama dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Tahun 2025 – 2029 yaitu Pemenuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah. Disamping pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi ASN dan penilaian kinerja dan disiplin ASN dengan kinerja pelayanan yaitu peningkatan kualitas SDM aparatur melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan pendidikan serta peningkatan ASN yang berkinerja baik.

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program ini memuat kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi manajerial, teknis, sosio-kultural dan pemerintahan dengan kinerja pelayanan yaitu peningkatan kualitas SDM aparatur berbasis tupoksi bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan konkuren, penunjang dan umum serta sertifikasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan dengan kinerja pelayanan yaitu peningkatan kompetensi dan sertifikasi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, administrasi, fungsional, kepemimpinan dan prajabatan.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang menjadi target pelayanan pada tahun 2020 - 2024 menurut golongan berjumlah :

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

No	Tahun	Golongan				JUMLAH
		IV	III	II	I	
1.	2024	774	3162	287	8	4231
2.	2023	791	3000	317	9	4711
3.	2022	805	2453	526	10	3794
4.	2021	758	2232	605	20	3615
5.	2020	802	2304	638	22	3766

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan sasaran/target Renstra periode 2020-2024 dituangkan dalam Tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Indikator	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Tingkat Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Persentase pemenuhan ASN di lingkungan pemerintah daerah		88%	89,21%	90,40%	92,60%	87,12 %	59,79 %	23,35%	82,16 %	96,92 %		67,94 %	26,17 %	90,88%	104,67%
2.	Persentase pegawai berkinerja baik		100%	100%	100%	100%	99,70 %	99,61 %	96,67%	99,78 %	99,97 %		99,61 %	96,67 %	99,78%	99,97%
3.	Cakupan ASN yang lulus diklat kepemimpinan/manajerial, diklat fungsional dan diklat teknis		100%	80,25%	81%	81,50%	18,96 %	46,04 %	150,70 %	74,16 %	95,85 %		46,04 %	187,79%	91,56%	117,61%
4.	Indeks Profesionalitas ASN		80%	82%	84 %	86 %		45,88 %	59,30%	76,48 %	78,46 %		57,35 %	72,32 %	0,91 %	0,91 %
5.	Persentase peningkatan kinerja pegawai		80%	82%	85 %	87 %	76,51 %	90,51 %	95,94%	97,72 %	96,80 %		113,14%	117%	1,15 %	1,11 %
6.	Persentase peningkatan disiplin pegawai		83%	85%	87 %	90 %	99,03 %	99,99 %	99,95%	99,99 %	99,99 %		120,47%	117,59%	1,15 %	1,11 %

7.	Persentase peningkatan pegawai dalam pengembangan kompetensi dan keahlian		58%	60%	62 %	64 %	55 %	56,98 %	59,98%	62,01 %	65,63 %		98,24 %	99, 97%	1,0 0%	1,03%
8.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		80%	82,79%	84 %	85 %		55,76 %	82,79%		87,31 %		69,70 %	100 %		1,03%
9.	Nilai sakip perangkat daerah		CC	CC	B	B	CC	CC	B	B	B		100%		100 %	100%
10.	Laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan		Sesua i	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesua i	Sesua i	Sesuai	Sesua i	Sesua i		100%	100 %	100 %	100%
11.	Indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah		73%	75%	78 %	80 %			75,4%	80,6 %	78,51 %			100 ,53 %	1,0 3%	0,98%
12.	Indeks Berakhlak									60,8 %	67,1 %					

Dari Tabel 2.5 tesebut di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Persentase pemenuhan ASN di lingkungan pemerintah daerah
   - Pada tahun 2020 dengan realisasi capaian 87,12%. Kondisi ini dipengaruhi oleh pandemi **COVID-19** yang menimbulkan dampak luas terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Sebagian anggaran mengalami refocusing serta penghematan untuk mendukung upaya penanganan pandemi, sehingga sejumlah kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat terlaksana secara optimal.
   - Pada tahun 2021 realisasi capaian 59,79%, dikarenakan formasi yang ditetapkan Menpab-RB sebanyak 679 dan yang terealisasi sebanyak 406, yang terdiri dari 83 formasi CPNS termasuk tenaga kesehatan dan teknis serta 323 formasi PPPK yaitu tenaga guru.
   - Pada tahun 2022 realisasi capaian 23,35% atau tidak sesuai dengan target yang direncanakan disebabkan karena ada 264 formasi PPPK khususnya guru yang belum keluar pengumumannya dan dijadwalkan pada bulan februari tahun 2023.
   - Pada tahun 2023 tidak mencapai target dengan presentasi 82,16% disebabkan karena 318 formasi PPPK yang diusulkan ke Menpan-RB namun yang ditetapkan hanya 314 formasi dan yang terealisasi (lulus) sebanyak 258, diantaranya guru 153, tenaga teknis 35 dan tenaga kesehatan sebanyak 70. Dari 314 formasi yang ditetapkan terdapat formasi yang kurang pendaftarnya bahkan ada formasi yang tidak ada pendaftarnya (kosong).
   - Pada tahun 2024 dengan presentasi 96,92% (mencapai target). Formasi yang diusulkan dan ditetapkan Menpan-RB sebanyak 130 yang terdiri dari 50 formasi CPNS dan 80 formasi PPPK. Formasi CPNS yang terealisasi sebanyak 46,

hal ini disebabkan terdapat peserta yang tidak lulus serta formasi yang tidak memiliki pendaftar (kosong) dan formasi PPPK terealisasi sebanyak 80.

2. Persentase pegawai berkinerja baik

- Pada tahun 2020 dengan realisasi capaian 99,70% dikarenakan masih terdapat pegawai yang mendapatkan pembinaan disiplin baik itu disiplin ringan, sedang dan berat berjumlah 14 orang.
- Pada tahun 2021 tidak memenuhi target yang direncanakan disebabkan masih ada pegawai yang mendapatkan pembinaan disiplin baik itu pembinaan disiplin ringan, sedang dan berat yang berjumlah 21 orang dengan realiasai capaian 99,61%.
- Pada tahun 2022 realisasi capaian 95,51% atau tidak sesuai target. Hal ini disebabkan karena jumlah pergawai yang mendapatkan pembinaan disiplin baik itu disiplin ringan, sedang dan berat berjumlah 170 orang.
- Pada tahun 2023 tidak memenuhi target yang direncanakan disebabkan masih ada pegawai yang mendapatkan pembinaan disiplin baik itu pembinaan disiplin ringan, sedang dan berat yang berjumlah 3 orang dengan realiasai capaian 99,92%.
- Pada tahun 2024 belum memenuhi target yang direncanakan dengan realisasi capaian 99,97% dikarenakan masih terdapat pegawai yang mendapatkan pembinaan disiplin, yaitu berjumlah 1 orang.
- Cakupan ASN yang lulus diklat kepemimpinan /manajerial, diklaf fungsional dan diklat teknis
- Pada tahun 2020 dengan realisasi capaian 18,96%. Kondisi ini dipengaruhi oleh pandemi **COVID-19** yang menimbulkan dampak luas terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Sebagian anggaran mengalami refocusing serta

penghematan untuk mendukung upaya penanganan pandemi, sehingga sejumlah kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat terlaksana secara optimal.

- Pada tahun 2021 dengan realisasi capaian 46,04%. Kondisi ini dipengaruhi pasca pandemi **COVID-19** yang menimbulkan dampak luas terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Sebagian anggaran mengalami refocusing serta penghematan untuk mendukung upaya penanganan pandemi, sehingga sejumlah kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat terlaksana secara optimal.\
- Pada tahun 2022 dengan presentasi 150% (melebihi target). Pada kegiatan PKA adanya peserta yang menggunakan mekanisme penganggaran mandiri melalui anggaran OPD masing-masing dan dari hasil pelaksanaan pelatihan teknis fungsional adanya kelebihan peserta pelatihan yang melebihi target peserta yang telah ditentukan pada pelatihan teknis yang telah dilaksanakan.
- Pada tahun 2023 tidak memenuhi target yang direncanakan disebabkan kurangnya usulan dari OPD untuk mengikuti pelatihan bagi jabatan fungsional dan biaya kontribusi pelatihan tiap lembaga penyelenggara pelatihan tidak sama sehingga tidak sesuai dengan indeks yang ada pada DPA.
- Pada tahun 2024 dengan capaian realisasi 95,85%, dikarenakan ditargetkan untuk kegiatan diklat baik itu Bimtek, PKN, PKA, PKP dan Orientasi PPPK sebanyak 241 orang, namun yang terealisasi hanya sebanyak 231 orang.

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kepulauan Selayar

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	8.556.553.200	6.637.724.700	6.275.262.000	7.083.193.000	8.276.260.346	6.329.720.602	6.029.910.532	6.819.067.029	0,96	0,95	0,96	0,96
KEPEGAWAIAN	6.203.484.200	5.194.544.700	5.704.194.000	6.127.449.700	5.923.731.646	5.097.797.770	5.483.859.354	5.894.357.886	0,95	0,98	0,96	0,96
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.617.692.200	4.099.839.200	4.343.525.200	4.648.246.700	4.506.418.258	4.046.417.009	4.252.960.107	4.470.869.796	0,97	0,98	0,97	0,96
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.443.000	33.612.000	25.653.100	33.991.400	43.443.000	33.612.000	25.242.100	30.915.200	1	1	0,98	0,9
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.230.000	16.625.000	13.352.000	16.018.500	19.230.000	16.625.000	13.241.000	15.302.600	1	1	0,99	0,95
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	15.233.000	3.040.000	2.458.000	2.476.800	15.233.000	3.040.000	2.458.000	1.997.600	1	1	1	0,8
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	0	3.000.000	1.542.000	2.995.000	0	3.000.000	1.542.000	2.625.800	0	1	1	0,87
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	0	2.950.000	2.134.100	2.313.000	0	2.950.000	2.134.100	2.128.500	0	1	1	0,92
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	0	3.000.000	2.814.000	2.975.000	0	3.000.000	2.514.000	2.653.000	0	1	0,89	0,89
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0	3.249.700	0	0	0	2.762.200	0	0	0	0,84
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.980.000	4.997.000	3.353.000	3.963.400	8.980.000	4.997.000	3.353.000	3.445.500	1	1	1	0,86
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.835.590.400	3.305.317.000	3.401.430.000	3.854.393.150	3.759.431.631	3.274.572.985	3.323.551.597	3.718.617.621	0,98	0,99	0,97	0,96
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.540.798.000	3.229.706.000	3.323.000.000	3.770.793.000	3.477.504.031	3.198.961.985	3.245.407.797	3.640.632.121	0,98	0,99	0,97	0,96
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	248.331.400	46.261.000	49.818.000	48.632.200	235.468.600	46.261.000	49.537.800	46.378.200	0,94	1	0,99	0,95
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	22.460.000	12.950.000	14.747.000	16.873.500	22.460.000	12.950.000	14.744.000	15.022.200	1	1	0,99	0,89

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.830.000	3.000.000	2.765.000	2.500.000	4.828.000	3.000.000	2.765.000	2.176.500	0,99	1	1	0,87
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	19.171.000	13.400.000	11.100.000	15.594.450	19.171.000	13.400.000	11.097.000	14.408.600	1	1	0,99	0,92
Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah	**16.000.000**	**11.109.000**	**11.109.000**	**12.837.400**	**16.000.000**	**7.509.000**	**11.109.000**	**11.432.700**	**1**	**0,67**	**1**	**0,89**
Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD	16.000.000	11.109.000	11.109.000	12.837.400	16.000.000	7.509.000	11.109.000	11.432.700	1	0,67	1	0,89
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**38.360.000**	**16.029.000**	**15.937.900**	**7.937.700**	**38.224.100**	**16.029.000**	**15.931.900**	**6.363.500**	**0,99**	**1**	**0,99**	**0,8**
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24.230.000	16.029.000	13.736.000	7.937.700	24.101.100	16.029.000	13.730.000	6.363.500	0,99	1	0,99	0,8
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	14.130.000	0	2.201.900	0	14.123.000	0	2.201.900	0	0,99	0	1	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**330.031.200**	**463.108.000**	**621.216.700**	**519.838.300**	**317.805.739**	**458.698.071**	**612.321.714**	**509.672.163**	**0,96**	**0,99**	**0,98**	**0,98**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	10.000.000	7.846.000	8.633.000	0	10.000.000	7.846.000	7.387.000	0	1	1	0,85
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	44.146.000	16.370.900	0	0	44.146.000	15.890.000	0	0	1	0,97
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	9.710.000	0	0	0	9.710.000	0	0	0	1	0	0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0	20.000.000	17.119.700	21.544.400		20.000.000	16.942.000	18.317.500	0	1	0,98	0,85
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	15.000.000	14.720.000	14.570.000	13.250.000	10.545.000	10.870.000	12.120.000	8.120.000	0,7	0,73	0,83	0,85
Penyediaan Bahan/Material	0	0	14.069.000	0	0	0	13.157.000	0	0	0	0,93	0
Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	259.119.000	352.678.000	470.803.000	420.040.000	258.433.339	352.675.871	470.158.514	420.032.463	0,99	0,99	0,99	0,99
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.912.200	16.000.000	12.990.000	10.000.000	14.787.400	15.650.200	12.990.000	9.925.200	0,92	0,97	1	0,99
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	40.000.000	40.000.000	39.673.000	30.000.000	34.040.000	39.792.000	34.962.200	30.000.000	0,85	0,99	0,88	1
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**10.500.000**	**50.000.000**	**14.372.500**	**0**	**9.000.000**	**50.000.000**	**14.372.500**	**0**	**0,85**	**1**	**1**	**0**
Pengadaan Mebel	10.500.000	0	14.372.500	0	9.000.000		14.372.500	0	0,85	0	1	0
Pengadaan Aset Tak Berwujud	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0	0	1	0	0

Penyediaan Jasa Penunjang Uruan Pemerintaha Daerah	**221.125.600**	**117.154.200**	**111.025.000**	**118.028.750**	**200.123.632**	**107.018.828**	**107.795.584**	**100.082.912**	**0,9**	**0,91**	**0,97**	**0,84**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.000.000	20.082.000	24.937.000	14.698.400	27.000.000	16.482.000	24.831.000	12.549.000	1	0,82	0,99	0,85
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.493.600	82.775.000	86.088.000	93.330.350	48.001.632	76.456.628	82.964.584	77.533.912	0,73	0,92	0,96	0,83
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	128.632.000	10.150.000	0	10.000.000	125.122.000	10.149.000	0	10.000.000	0,97	0,99	0	1
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	4.147.200	0	0	0	3.931.200	0	0	0	0,94	0	0
Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**122.642.000**	**103.510.000**	**142.781.000**	**101.220.000**	**122.390.156**	**98.977.125**	**142.635.712**	**93.785.700**	**0,99**	**0,95**	**0,99**	**0,92**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.992.000	103.510.000	92.830.000	101.220.000	66.938.156	98.977.125	92.684.712	93.785.700	0,99	0,95	0,99	0,92
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.970.000	0	49.951.000	0	49.788.000	0	49.951.000	0	0,99	0	1	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.680.000	0	0	0	5.664.000	0	0	0	0,99	0	0	0
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	**1.585.792.000**	**1.094.705.500**	**1.360.668.800**	**1.479.203.000**	**1.417.313.388**	**1.051.380.761**	**1.230.899.247**	**1.423.488.090**	**0,89**	**0,96**	**0,9**	**0,96**
Pengadaan,Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	**607.394.000**	**384.878.000**	**375.643.300**	**474.000.000**	**451.784.089**	**353.561.947**	**371.668.651**	**464.853.754**	**0,74**	**0,91**	**0,98**	**0,98**
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	5.070.000	16.490.000	44.041.300	18.714.000	4.431.200	16.167.200	43.886.200	18.171.700	0,87	0,98	0,99	0,97
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	94.860.000	15.000.000	35.060.000	286.970.000	84.296.500	11.640.000	34.407.054	281.025.374	0,88	0,77	0,98	0,97
Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	342.432.000	240.262.000	147.607.000	19.553.000	204.822.817	215.874.067	145.827.888	18.286.000	0,59	0,89	0,98	0,93
Koordinasi Pelaksanaan Adminitrasi Pemberhentian	41.020.000	19.338.000	16.552.100	19.138.000	40.907.300	18.990.400	16.132.900	18.983.300	0,99	0,98	0,97	0,99
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	30.468.000	25.258.000	73.794.000	80.188.000	30.457.200	24.800.000	73.180.509	79.581.780	0,99	0,98	0,99	0,99
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	68.544.000	19.736.000	0	0	62.443.272	19.005.200	0	0	0,91	0,96	0	0
Pengelolaan Data Kepegawaian	0	31.832.000	46.435.900	30.323.000	0	30.181.600	46.435.900	29.942.100	0	0,94	1	0,98
Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	25.000.000	16.962.000	12.153.000	19.114.000	24.425.800	16.903.480	11.798.200	18.863.500	0,97	0,99	0,97	0,98
Mutasi dan Promosi ASN	**416.309.000**	**395.128.000**	**502.565.800**	**567.000.500**	**414.581.198**	**389.278.100**	**387.601.231**	**531.078.250**	**0,99**	**0,98**	**0,77**	**0,93**
Pengelolaan Mutasi ASN	78.512.000	58.466.000	66.643.200	48.400.000	78.507.700	57.549.100	47.767.160	39.184.500	0,99	0,98	0,71	0,8
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	126.000.000	106.479.000	140.325.200	78.600.000	125.496.498	101.679.000	139.317.030	76.584.400	0,99	0,95	0,99	0,97
Pengelolaan Promosi ASN	211.797.000	230.183.000	295.597.400	440.000.500	210.577.000	230.050.000	200.517.041	415.309.350	0,99	0,99	0,67	0,94

Pengembangan Kompetensi ASN	**442.801.000**	**262.544.000**	**389.485.000**	**378.602.500**	**432.447.863**	**257.975.314**	**380.695.785**	**375.010.186**	**0,97**	**0,98**	**0,97**	**0,99**
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	14.271.000	0	12.788.000	0	14.271.000	0	12.788.000	0	1	0	1	0
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	75.000.000	137.886.000	273.197.000	312.992.500	71.172.200	133.719.200	273.034.400	310.003.100	0,94	0,96	0,99	0,99
Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	230.360.000	114.658.000	95.500.000	0	229.848.062	114.656.114	86.873.385	0	0,99	0,99	0,9	0
Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	72.000.000	10.000.000	8.000.000	65.610.000	66.414.601	9.600.000	8.000.000	65.007.086	0,92	0,96	1	0,99
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	28.000.000	0	0	0	28.000.000	0	0	0	1	0	0	0
Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	23.170.000	0	0	0	22.742.000	0	0	0	0,98	0	0	0
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**119.288.000**	**52.155.500**	**92.974.700**	**59.600.000**	**118.500.238**	**50.565.400**	**90.933.580**	**52.545.900**	**0,99**	**0,96**	**0,97**	**0,88**
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	0	0	7.146.100	0	0	0	6.942.100	0	0	0	0,97	0
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	40.000.000	0	33.116.000	0	39.221.000	0	31.916.000	0	0,98	0	0,96	0
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	58.248.000	31.270.800	18.402.000	39.600.000	58.240.137	30.070.700	18.035.680	34.536.100	0,99	0,96	0,98	0,87
Pembinaan Disiplin ASN	21.040.000	20.884.700	21.734.600	20.000.000	21.039.101	20.494.700	21.463.800	18.009.800	0,99	0,98	0,98	0,9
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	0	0	12.576.000	0	0	0	12.576.000	0	0	0	1	0
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	**2.353.069.000**	**1.443.180.000**	**571.068.000**	**955.743.300**	**2.352.528.700**	**1.231.922.832**	**546.051.178**	**924.709.143**	**0,99**	**0,85**	**0,95**	**0,96**
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	**2.353.069.000**	**1.443.180.000**	**571.068.000**	**955.743.300**	**2.352.528.700**	**1.231.922.832**	**546.051.178**	**924.709.143**	**0,99**	**0,85**	**0,95**	**0,96**
Pengembangan Kompetensi Teknis	**0**	**249.850.000**	**234.792.000**	**254.268.600**	**0**	**74.532.428**	**211.065.720**	**252.423.200**	**0**	**0,29**	**0,89**	**0,99**
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	0	246.000.000	234.792.000	254.268.600	0	74.532.428	211.065.720	252.423.200	0	0,3	0,89	0,99
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	0	3.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	**2.353.069.000**	**1.193.330.000**	**336.276.000**	**701.474.700**	**2.352.528.700**	**1.157.390.404**	**334.985.458**	**672.285.943**	**0,99**	**0,96**	**0,99**	**0.95**
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2.353.069.000	1.193.330.000	336.276.000	701.474.700	2.352.528.700	1.157.390.404	334.985.458	672.285.943	0,99	0,96	0,99	0,95

Berdasarkan Tabel 2.6 menunjukkan bahwa rasio antara realisasi dan anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dikatakan baik untuk tahun 2021-2024. Pada tahun 2021, rata-rata rasio anggaran dan realisasi mencapai 0,99; pada tahun 2022 mencapai 1,00; pada tahun 2023 mencapai 1,00 dan pada tahun 2024 mencapai 0,99.

Faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yaitu adanya beberapa program yang tidak dapat dihitung pertumbuhannya dikarenakan hanya dianggarkan pada tahun-tahun tertentu saja.

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut di atas menggambarkan kinerja pelayanan yang masih rendah. Kondisi tersebut tidak terlepas dari beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi.

Adapun tantangan yang dihadapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

a. Perubahan dan pengembangan peraturan bidang kepegawaian yang harus ditangani secara cepat dan tepat;
b. Jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun untuk 5 tahun kedepan yang perlu disiapkan penggantinya;
c. Posisi jabatan struktural/fungsional ASN yang belum sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja;
d. Masih adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan ASN;
e. ASN yang masih memerlukan pendidikan penjenjangan untuk meningkatkan kompentensinya;

Sementara peluang dalam pengembangan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar yang dapat dioptimalkan antara lain :

a. Adanya potensi Sumber Daya Manusia Aparatur yang dapat dikembangkan dalam penataan personil;
b. Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada aparatur agar ASN berdisiplin dan profesional;
c. Adanya Kebijakan Pemerintah untuk mengembangkan dan mengelola ASN yang professional dalam penataan manejemen ASN;

d. Sistem Teknologi Informasi dan komputerisasi yang mendukung pelayanan yang prima,cepat dan tepat.

Peluang-peluang tersebut diharapkan dapat dikelola untuk menjawab tantangan yang ada.

2.1.5 Kelompok Sasaran Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kelompok sasaran adalah pihak yang secara langsung menerima manfaat dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dirancang. Dalam hal ini, pegawai ASN merupakan kelompok utama yang menjadi target dari berbagai layanan dan program pengembangan BKPSDM, karena merekalah penerima manfaat utama dari seluruh fungsi pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur. Fokus pelayanan kepada mereka bertujuan meningkatkan kompetensi, profesionalitas dan kinerja birokrasi, yang pada akhirnya mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

BKPSDM memiliki fungsi utama dalam pengelolaan kepegawaian (rekrutmen, mutasi, promosi, pensiun, dsb), pengembangan kompetensi dan karier pegawai, penilaian kinerja pegawai serta pelatihan, pendidikan dan pembinaan pegawai, karena itu seluruh pegawai ASN baik PNS maupun PPPK, merupakan penerima langsung dari layanan ini. Sasaran ini ditetapkan karena peningkatan kapasitas dan profesionalisme ASN akan berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik.

Pelayanan yang diberikan BKPSDM kepada pegawai ASN meliputi administrasi kepegawaian (pengurusan sk, kenaikan

pangkat, pensiun dan sebagainya), pengembangan kompetensi (pelatihan, diklat, seminar dan workshop), manajemen talenta dan karier (sistem merit dan promosi berdasarkan kinerja dan potensi), penilaian dan evaluasi kinerja (implementasi SKP dan pemetaan kompetensi) serta digitalisasi pelayanan kepegawaian untuk memudahkan akses layanan ASN secara efisien dan transparan.

2.1.6 Mitra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam pemberian pelayanan

Hubungan kerja sama antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Selatan dibangun atas dasar komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas aparatur sipil negara melalui program pengembangan kompetensi yang terarah, sistematis dan sesuai standar nasional.

BKPSDM sebagai perangkat daerah yang bertugas mengelola manajemen kepegawaian dan pengembangan SDM aparatur memiliki kewenangan dalam mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, menyusun rencana pengembangan kompetensi, serta memfasilitasi partisipasi ASN daerah dalam berbagai program pelatihan. Sementara itu, BPSDM baik di tingkat provinsi maupun kementerian, berperan sebagai penyelenggara resmi pendidikan dan pelatihan, yang memiliki akreditasi, kurikulum, serta sumber daya pengajar yang diakui secara nasional.

Kerja sama ini mencakup pertukaran data kebutuhan pelatihan, penyusunan kurikulum yang relevan dengan

kebutuhan daerah, pelaksanaan berbagai jenis diklat seperti pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional, hingga pemberian sertifikat resmi kepada peserta yang telah menyelesaikan pelatihan. Selain itu, BPSDM menyediakan fasilitas pelatihan, tenaga widyaiswara, serta modul pembelajaran, sedangkan BKPSDM mengatur seleksi peserta, pembiayaan sesuai kemampuan daerah dan pencatatan hasil pelatihan ke dalam sistem informasi kepegawaian.

Sinergi antara BKPSDM dan BPSDM ini memberikan manfaat strategis, antara lain memastikan terpenuhinya kewajiban pengembangan kompetensi minimal ASN sesuai peraturan perundang-undangan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi pegawai, serta memperkuat jaringan kerja antar-instansi. Melalui kolaborasi yang berkesinambungan, diharapkan terbentuk aparatur sipil negara yang kompeten, berintegritas, dan siap memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Selain bermitra dengan BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar juga menjalin kerja sama strategis dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kanreg IV Makassar dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) dalam rangka optimalisasi pelayanan kepegawaian. Hubungan kemitraan dengan BKN Kanreg IV Makassar diwujudkan melalui penyelenggaraan manajemen kepegawaian sesuai ketentuan nasional, pemanfaatan sistem informasi kepegawaian terintegrasi, serta pelaksanaan seleksi penerimaan ASN menggunakan metode *Computer Assisted Test* (CAT) yang difasilitasi oleh BKN Kanreg IV Makassar. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan seleksi CASN beberapa tahun

terakhir, BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar bekerja sama dengan BKN Kanreg IV Makassar dalam penyediaan sistem, perangkat, serta supervisi pelaksanaan ujian, sehingga proses rekrutmen berjalan lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, BKN Kanreg IV Makassa juga memberikan bimbingan teknis terkait pemutakhiran data ASN melalui aplikasi SIASN agar data kepegawaian lebih valid dan terintegrasi secara nasional.

Sementara itu, kerja sama dengan Kementerian PANRB terimplementasi dalam bentuk penyesuaian kebijakan reformasi birokrasi, penyusunan analisis jabatan dan kebutuhan formasi ASN, penguatan sistem merit, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Misalnya, BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar secara berkala menyusun dan menyampaikan usulan formasi ASN kepada Kementerian PANRB untuk mendapatkan persetujuan, serta melaksanakan evaluasi jabatan yang menjadi dasar dalam penetapan tunjangan kinerja untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.

Dengan adanya sinergi bersama BPSDM Sulsel, BKN Kanreg IV Makassar dan Kementerian PANRB ini, BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar dapat menyelenggarakan pelayanan kepegawaian yang lebih efektif, akuntabel dan sesuai dengan regulasi nasional, sekaligus mendukung terciptanya ASN yang profesional dan berintegritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dari analisis lingkungan internal dan eksternal, isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDM tidak lepas dari Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2030 yang telah dirumuskan dan penting untuk diperhatikan, diantaranya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Tata kelola pemerintahan merupakan aspek sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan pada suatu daerah termasuk di Kabupaten Kepulauan Selayar. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dapat dicerminkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi yang baik.

Data menunjukkan, sampai dengan tahun 2022, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kepulauan Selayar masih berada pada predikat cukup. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar belum optimal. Untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang memiliki integritas, profesional, serta mampu menyelenggarakan urusan pelayanan publik. Pegawai Negeri Sipil Daerah merupakan sumber daya aparatur di daerah sehingga perlu dilakukan pengembangan kompetensi sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dengan kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan perilaku Pegawai Negeri Sipil Daerah, diharapkan mampu mewujudkan pelayanan publik. Dari analisis isu strategis pembangunan daerah tersebut di atas, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kemudahan pelayanan publik, pelayanan administrasi dan hak-hak

masyarakat lainnya dapat terlayani dengan baik. Kemudian dari hasil analisis lingkungan daerah untuk mewujudkan pelayanan public.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi adalah menyelenggarakan administrasi kepegawaian di daerah dengan Norma, Sistem, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi :

- Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan;
- Pengadaan;
- Pangkat dan Jabatan;
- Pengembangan Karier;
- Pola Karier;
- Promosi;
- Mutasi;
- Penilaian Kinerja;
- Penggajian dan Tunjangan;
- Penghargaan;
- Disiplin;
- Pemberhentian;
- Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari tua
- Perlindungan

Untuk mendukung program pembangunan pemerintah daerah selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai agenda dan prioritas pembangunan daerah, diantaranya meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dan adaptif, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja melalui ”Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur” yang menghasilkan ASN kreatif, inovatif dan kolaboratif serta mampu mengikuti perubahan lingkungan dan perkembangan

teknologi digital, dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan inovasi daerah. Sebagai konsekuensi dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dalam memberikan kemudahan pelayanan publik tentunya perlu disiapkan penataan sumber daya Pegawai Negeri Sipil Daerah. Uraian tersebut merupakan gambaran lingkungan strategis di Kepulauan Selayar yang perlu mendapat prioritas penanganan dalam periode 2025-2030.

Kondisi lingkungan strategis ini selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program-program strategis sebagai landasan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029.

Tabel 2.7
Permasalahan-Permasalahan Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Belum optimalnya tata kelola ASN	1. Integritas ASN masih rendah; 2. Kinerja ASN yang rendah dan belum terukur	1. Belum terwujudnya pelayanan yang cepat dan berkualitas serta terjadinya praktik penyalahgunaan kewenangan; 2. Kinerja pegawai belum dirumuskan secara memadai dan belum terintegrasi dengan indikator kinerja

			organisasi
2.	Belum optimalnya penguatan kapasitas aparatur daerah	1. Program yang direncanakan tidak optimal karena kurangnya dukungan dan koordinasi OPD 2. Dokumen Analisis perencanaan kebutuhan pengembangan (APKP) kompetensi manajerial dari OPD belum disusun	1. OPD masih mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kapasitas ASN dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bimtek tanpa koordinasi dengan BKPSDM. 2. Kebutuhan pengembangan kompetensi manajerial, teknis dan fungsional setiap tahun dari perangkat daerah belum terpenuhi 3. Masih kurangnya analis diklat yang ditempatkan pada OPD
3.	Belum optimalnya pelaksanaan harmonisasi regulasi kepegawaian daerah	1. Adanya kebijakan nasional yang berubah-ubah sehingga kebijakan internal daerah tidak optimal	1. Adanya perubahan kelembagaan sehingga standar kompetensi jabatan manajerial dan fungsional harus disusun kembali/ diulang
4.	Belum optimalnya pengadaan	1. Proses rekrutmen belum sepenuhnya berbasis	1. Keterbatasan kapasitas SDM dalam melakukan

	pegawai ASN yang didasarkan pada hasil analisis beban kerja yang komprehensif	kebutuhan dan analisis jabatan/beban kerja 2. Terjadi ketidaksesuaian antara kualifikasi pegawai dengan jabatan yang ditempati dan distribusi pegawai antar unit kerja belum merata	perencanaan kebutuhan pegawai berbasis data 2. Kurangnya integrasi data kepegawaian dengan sistem perencanaan SDM 3. Lemahnya koordinasi antara instansi pengguna pegawai dengan instansi pengelola kepegawaian

2.2.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah pernyataan mengenai suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah selama 5 tahun.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar Pemerintah Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri

dengan lingkungan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Selain itu isu strategis yang akan dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kedepannya, yaitu :

- **Peningkatan kualitas dan daya saing ASN**
  ASN sebagai unsur utama aparatur negara dituntut untuk memiliki kualitas dan daya saing tinggi dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Namun, masih terdapat kesenjangan antara kompetensi ASN dengan kebutuhan organisasi, baik dari sisi teknis, manajerial, maupun sosial kultural. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan daya saing ASN menjadi isu strategis penting untuk menjawab tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks dan dinamis.
- **Penguatan tata kelola dan akuntabilitas manajemen ASN**
  Tata kelola manajemen ASN saat ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal konsistensi penerapan prinsip merit, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas dalam setiap proses manajemen kepegawaian. Kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap birokrasi. Dengan demikian, penguatan tata kelola dan akuntabilitas manajemen ASN menjadi isu strategis guna mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan berorientasi pelayanan.
- **Percepatan implementasi Smart ASN**
  Perkembangan teknologi informasi dan era digitalisasi menuntut ASN untuk bertransformasi menjadi Smart ASN yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap perubahan. Namun, implementasi Smart ASN masih berjalan secara

bertahap dan belum merata di seluruh perangkat daerah. Hal ini menjadi isu strategis karena percepatan implementasi Smart ASN merupakan kunci peningkatan daya saing birokrasi di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0.

- **Peningkatan kompetensi pegawai ASN**

  Berdasarkan evaluasi, masih terdapat ASN dengan kompetensi yang belum sepenuhnya sesuai dengan standar jabatan maupun kebutuhan organisasi. Kesenjangan ini berdampak pada rendahnya produktivitas dan efektivitas pelayanan publik. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi ASN, baik melalui pendidikan dan pelatihan, pengembangan kompetensi teknis, manajerial, maupun sosial kultural, menjadi isu strategis yang harus mendapat perhatian utama.

- **Penguatan harmonisasi regulasi dan kebijakan internal kepegawaian di daerah**

  Masih terdapat regulasi dan kebijakan internal kepegawaian di daerah yang belum sepenuhnya selaras dengan kebijakan nasional maupun antar perangkat daerah. Hal ini dapat menimbulkan ketidaksinkronan dan potensi tumpang tindih dalam implementasi manajemen ASN. Dengan demikian, harmonisasi regulasi dan kebijakan internal kepegawaian di daerah merupakan isu strategis yang harus dioptimalkan untuk mewujudkan kepastian hukum dan efektivitas kebijakan.

- **Pengadaan dan distribusi pegawai ASN berbasis Analisis Beban Kerja (ABK) dan kebutuhan riil organisasi**

  Selama ini, pengadaan dan distribusi ASN masih menghadapi kendala dalam kesesuaian antara jumlah dan kualifikasi pegawai dengan kebutuhan riil perangkat daerah. Sebagian besar penempatan ASN belum sepenuhnya berbasis pada Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban

Kerja (ABK). Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan distribusi pegawai antar perangkat daerah. Oleh karena itu, pengadaan dan distribusi pegawai ASN berbasis ABK dan kebutuhan riil organisasi merupakan isu strategis dalam penguatan kapasitas kelembagaan daerah.

- **Pengangkatan dan penataan tenaga non ASN**
  Keberadaan tenaga non ASN masih menjadi perhatian serius dalam manajemen kepegawaian daerah. Banyak tenaga non ASN yang telah lama mengabdi namun belum memiliki kepastian status kepegawaian. Selain itu, penataan tenaga non ASN masih belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebutuhan organisasi. Dengan adanya kebijakan nasional terkait penghapusan tenaga non ASN, maka pengangkatan dan penataan tenaga non ASN menjadi isu strategis yang memerlukan kebijakan adaptif dan solutif.

- **Integrasi dan transformasi digital layanan kepegawaian yang belum optimal**

  Layanan kepegawaian di daerah masih menghadapi keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi informasi, di mana sebagian layanan masih dilakukan secara manual atau parsial. Hal ini mengakibatkan rendahnya efisiensi, efektivitas, dan transparansi layanan. Oleh karena itu, integrasi dan transformasi digital layanan kepegawaian menjadi isu strategis yang mendesak, untuk mewujudkan layanan yang cepat, akurat, transparan, dan berbasis data (evidence-based).

TABEL 2.8

ISU STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	1. Belum optimalnya tata kelola ASN 2. Belum optimalnya pengembangan smart ASN 3. Belum optimalnya pelaksanaan harmonisasi regulasi kepegawaian daerah 4. Belum optimalnya	Tata Kelola Pemerintahan	1. Transformasi digital dan Inovasi teknologi	1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia 2. Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah 3. Transformasi teknologi digital	1. Daya saing sumber daya manusia	1. Peningkatan kualitas dan daya saing ASN 2. Penguatan tata kelola dan akuntabilitas manajemen ASN 3. Percepatan implementasi smart ASN 4. Peningkatan kompetensi pegawai ASN 5. Penguatan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	pengadaan pegawai ASN yang didasarkan pada hasil analisis beban kerja yang komprehensif					harmonisasi regulasi dan kebijakan internal kepegawaian di daerah 6. Pengadaan dan distribusi pegawai ASN berbasis Analisis Beban Kerja dan kebutuhan riil organisasi 7. Pengangkatan dan penataan tenaga non ASN

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						8. Integrasi dan transformasi digital layanan kepegawaian yang belum optimal

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menghadapi permasalahan dan isu-isu strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan daerah dalam mendukung kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencapai Visi Pembangunan Daerah 2025-2029.

a. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dengan melaksanakan misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi BKPSDM dan menangani isu strategis daerah yang ada. Tujuan harus bersifat realistis dan harus dicapai.

Tujuan dalam Renstra ini diartikan sebagai sesuatu yang diinginkan tercapai dan merupakan penjabaran dari pokok-pokok misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar. Tujuan jangka menengah Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 adalah Meningkatkan tata kelola manajemen ASN yang berakhlak.

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, dengan demikian sebuah tujuan dapat terjabarkan ke dalam lebih dari satu sasaran.

Sasaran jangka menengah Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 yaitu Meningkatnya Profesionalitas ASN dan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah.

Merujuk pada pernyataan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam lima tahun ke depan (2025-2029), maka tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan tujuan dan sasaran Pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 2025-2029, dapat dilihat pada tabel 3.1. di bawah ini.

Tabel 3.1.
TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA BKPSDM

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	DATA CAPAIAN AWAL	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
Sasaran 1 (S1) : Meningkatnya birokrasi pemerintahan transparan dan kolaboratif	Meningkatkan tata kelola manajemen ASN yang berakhlak		Indeks Berakhlak	61,7%	70	74	78	82	86	90
		Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	78,46%	78,48	78,50	78,52	78,54	78,56	79
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan BKPSDM	78,51%	79	80	81	82	83	84
			Nilai SAKIP BKPSDM	B	B	B	B	B	B	B

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Badan Kepegawaian dan Pegembangan Sumber Daya Manusia adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah. Strategi dan kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD.

Strategi dan kebijakan jangka menengah BKPSDM menjadi dasar perumusan kegiatan serta target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi BKPSDM. Strategi dan kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

a. Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efesiensi pencapaian target sasaran.

Selain itu, strategi juga berguna sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar secara berkelanjutan.

b. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arah Kebijakan yang dirumuskan harus dapat :

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional;
2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;
3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas BKPSDM yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih;

4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tupoksi BKPSDM agar tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan melanggar kepentingan umum.

Strategi dan arah kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam lima tahun mendatang dapat di lihat pada tabel berikut :

TABEL 3.2

ARAH KEBIJAKAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN BKPSDM	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Meningkatkan kualitas ASN berbasis merit	Penguatan Manajemen ASN berbasis merit	
		Meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Digitalisasi layanan kepegawaian	
		Menata SDM wilayah kepulauan dalam rangka persiapan pemekaran daerah	Penataan dan Pengembangan SDM di wilayah kepulauan	

TABEL 3.3

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : "Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera"			
MISI 1 : Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif			
TUJUAN BKPSDM	SASARAN BKPSDM	ARAH KEBIJAKAN BKPSDM	STRATEGI BKPSDM
1. Meningkatkan tata kelola manajemen ASN yang berakhlak	1. Meningkatnya Profesionalitas ASN 2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	1. Penguatan Manajemen ASN berbasis merit	1. Penerapan sistem merit dalam penyelenggaraan manajemen ASN 2. Peningkatan kompetensi ASN berbasis kebutuhan jabatan 3. Penguatan sistem manajemen kinerja ASN
		2. Digitalisasi layanan kepegawaian	4. Digitalisasi sistem layanan administrasi kepegawaian 5. Pengembangan aplikasi layanan kepegawaian terintegrasi 6. Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan layanan digital
		3. Penataan dan Pengembangan SDM di wilayah kepulauan	7. Pemerataan distribusi ASN di wilayah kepulauan 8. Persiapan SDM untuk pemekaran daerah 9. Penguatan kapasitas ASN di wilayah kepulauan

TABEL 3.4

PENAHAPAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGAMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penataan dasar kelembagaan dan sistem manajeman ASN	Penguatan kapasitas dan kompetensi ASN	Pemantapan sistem merit dalam manajemen ASN	Optimalisasi budaya kerja ASN berbasis nilai berakhlak	Perwujudan ASN Profesionalitas, Berintegrasi dan Berbudaya Unggul

*Catatan :

Penataan Sistem (2026) → Peningkatan Kapasitas (2027) → Merit dan Integritas (2028) → Budaya Kerja (2029) → ASN Profesional (2030)

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, SubKegiatan, Kinerja Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah serta mewujudkan arah kebijakan, BKPSDM merencanakan program, kegiatan, dan subkegiatan yang terstruktur, sistematis, serta berbasis pada isu strategis manajemen kepegawaian daerah. Rencana ini sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan kebutuhan pendanaan secara realistis dan proporsional sesuai kemampuan keuangan daerah.

Rencana program disusun dengan mempertimbangkan isu strategis manajemen kepegawaian daerah, kebutuhan nyata organisasi, serta tantangan perubahan lingkungan strategis, khususnya di era digital dan transformasi birokrasi. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) merumuskan rencana kegiatan yang terarah, berkesinambungan dan selaras dengan sasaran strategis daerah. Rencana kegiatan ini disusun berdasarkan arah kebijakan nasional terkait manajemen ASN. Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, BKPSDM merumuskan rencana subkegiatan yang bersifat lebih teknis, rinci dan operasional. Subkegiatan ini berperan sebagai instrumen nyata dalam mendukung pencapaian sasaran strategis pengembangan aparatur sipil negara serta penataan manajemen kepegawaian di daerah.

Perencanaan pendanaan disusun untuk menjamin terselenggaranya program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah

direncanakan, dengan mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Perencanaan pendanaan ini diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan operasional rutin, tetapi juga untuk mendukung prioritas pembangunan daerah melalui penguatan manajemen aparatur sipil negara.

TABEL 4.1
PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
	Meningkatkan tata kelola manajemen ASN yang				Indeks berakhlak		
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik perangkat daerah			Nilai SAKIP BKPSDM		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan BKPSDM		
			Meningkatnya capaian realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja urusan pemerintahan daerah		**Persentase capaian realisasi anggaran**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	
					Persentase capaian kinerja		
				Tersusunnya Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Diselesaikan Tepat Waktu	Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Diselesaikan Tepat Waktu	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	

				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersedianya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen/Laporan Pengelolaan Keuangan Yang Tepat Waktu	Persentase Dokumen/Laporan Pengelolaan Keuangan Yang Tepat Waktu	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Tersusunya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

				Tersedianya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Tersusunnya Dokumen/Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Diselesaikan Tepat Waktu	Persentase Dokumen/Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Diselesaikan Tepat Waktu	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan BMD	Persentase Rencana Kebutuhan BMD yang tersedia	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	
				Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah Pada SJKPD	Persentase Laporan Barang Milik Daerah Pada SJKPD yang tersedia	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SJKPD	

Activate Windows

				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Output : Tersedianya Pegawai ASN yang Memiliki Predikat Kinerja Sangat Baik	Persentase ASN yang Memiliki Predikat Kinerja Sangat Baik	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Terselaksananya Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam Melaksanakan Tugas	

				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersusunnya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	

				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	
				Tersedianya Bahan Material	Jumlah Bahan Material yang tersedia	Penyediaan Bahan Material	
				Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu yang tersedia	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah yang menjadi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang menjadi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan dan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	

				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya mebel kantor	Jumlah Paket mebel yang disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Aset tak berwujud	JumlahUnit Aset Tak Berwujud yang disediakan	Pengadaan Aset Tak Berwujud	
				Tersusunnya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	

				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	
				Tersusunnya Barang Milik Daerah Dalam Keadaan Baik	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Keadaan Baik	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
				Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	

Activate Windows
Go to Settings to activate

				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya profesionalitas ASN			Indeks Profesionalitas ASN		
			Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur		**Persentase aparatur yang berkinerja baik dan/atau sangat baik**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	
			Meningkatnya Kompetensi ASN Sesuai Dengan Jabatan		**Persentase ASN yang memiliki Kompetensi sesuai dengan Jabatan**		
			Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian		**Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Anjab/ABK**		
				Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	
				Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	

				Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	
				Terlaksananya Evaluasi Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	
				Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	
				Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	
				Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	
				Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Pengelolaan Data Kepegawaian	
				Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	

				Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Mutasi dan Promosi ASN	**Mutasi dan Promosi ASN**	
				Terlaksananya Mutasi ASN yang meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Pengelolaan Mutasi ASN	
				Terlaksananya pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	
				Terlaksananya pengelolaan pengembangan promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	
				Terlaksananya pengembangan kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	**Pengembangan Kompetensi ASN**	
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kinerja	Jumlah ASN yang meningkat Kapasitas Kinerjanya	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	
				Terselenggaranya Pengelolaan Assesment Centre	Jumlah ASN yang mengikuti Assesment	Pengelolaan Assesment Centre	
				Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	
				Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Fasilitas Sertifikasi Jabatan	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	

Activate Windows
Go to Settings to activate

				Tersedianya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	
				Terselenggaranya Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah dokumen Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN yang disediakan	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	
				Terselenggaranya Pengembangan Karir Dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Karir	Fasilitasi Pengembangan Karir Dalam Jabatan Fungsional	
				Terselenggaranya Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional yang tersedia	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	
				Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	
				Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
				Terlaksananya Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberi pengharghaan	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	

Activate Windows
Go to Settings to activate

				Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	
				Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Pembinaan Disiplin ASN	
				Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	
				Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah ASN yang pendapatkan proses izin perceraian	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	
			Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional		**Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	
			Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial		**Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial**		
				Terlaksananya Kebijakan Teknis Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Berbasis Tupoksi	Persentase Penyusunan Kebijakan Teknis Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Berbasis	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	

Activate Windows
Go to Settings to activate

				Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang disusun	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
				Tersusunya Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintah Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintah Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang disusun	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintah Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	

				Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggra Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
				erlaksananya Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	

				Terselenggaranya Pemetaan dan Evaluasi Kompetensi Jabatan Pengawas	Pelaksanaan Pemetaan dan Evaluasi Kompetensi Jabatan Pengawas	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	
				Tersedianya Kebijakan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Penyusunan Kebijakan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	
				Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME /KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			TAHUN (2025)		TAHUN (2026)		TAHUN (2027)		TAHUN (2028)		TAHUN (2029)		TAHUN (2030)		
			PAGU INDIKATIF (RP)	TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)	TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)	TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)	TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)	TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA			**5,586,785,500**		**7,237,696,000**		**5,690,571,600**		**5,559,532,600**		**5,783,924,600**		**5,876,840,500**		
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			**4,556,318,500**		**5,190,697,500**		**4,757,187,400**		**4,628,821,900**		**4,870,987,900**		**4,932,083,500**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**4,556,318,500**		**5,190,697,500**		**4,757,187,400**		**4,628,821,900**		**4,870,987,900**		**4,932,083,500**		
Outcome : Meningkatnya capaian realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja urusan pemerintahan daerah	**Persentase capaian realisasi anggaran**	**88.00%**		**91%**		**95%**		**95,50%**		**96.00%**		**97.00%**		**97,99%**	
	Persentase capaian kinerja	**70.53%**		**71,51%**		**72,31%**		**73.00%**		**73,90%**		**95.00%**		**96.00%**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
Output : Tersusunnya Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Diselesaikan Tepat Waktu	Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang	100%	25,314,400.00	100%	29,469,400.00	100%	39,100,000.00	100%	41,600,000.00	100%	44,200,000.00	100%	46,800,000.00	100%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
Output : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	12,336,400.00	3 Dokumen	9,015,900.00	4 Dokumen	16,000,000.00	4 Dokumen	16,300,000.00	4 Dokumen	16,600,000.00	4 Dokumen	17,000,000.00	5 Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
Output : Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1,509,700.00	2 Dokumen	3,097,000.00	1 Dokumen	3,700,000.00	1 Dokumen	4,000,000.00	1 Dokumen	4,500,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	2 Dokumen	

Activate Windows

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
Output : Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1,491,000.00	2 Dokumen	3,079,000.00	1 Dokumen	3,500,000.00	1 Dokumen	3,850,000.00	1 Dokumen	4,200,000.00	1 Dokumen	4,500,000.00	1 Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
Output : Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1,861,100.00	2 Dokumen	3,094,000.00	1 Dokumen	3,800,000.00	1 Dokumen	4,200,000.00	1 Dokumen	4,600,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD															
Output : Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1,522,300.00	2 Dokumen	3,039,000.00	1 Dokumen	3,600,000.00	1 Dokumen	4,000,000.00	1 Dokumen	4,300,000.00	1 Dokumen	4,500,000.00	1 Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
Output : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	3,108,200.00	2 Laporan	4,000,000.00	3 Laporan	4,000,000.00	3 Laporan	4,250,000.00	3 Laporan	4,500,000.00	3 Laporan	4,800,000.00	3 Laporan	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
Output : Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3,485,700.00	1 Laporan	4,144,500.00	2 Laporan	4,500,000.00	2 Laporan	5,000,000.00	2 Laporan	5,500,000.00	2 Laporan	6,000,000.00	2 Laporan	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
Output : Tersusunnya Dokumen/Laporan Pengelolaan Keuangan Yang Tepat Waktu	Persentase Dokumen/Laporan Pengelolaan Keuangan Yang Tepat Waktu	100%	4,015,157,750.00	100%	4,131,562,000.00	100%	3,790,887,400.00	100%	3,645,367,000.00	100%	3,814,087,900.00	100%	3,826,283,500.00	100%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
Output : Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	3,930,506,000.00	43 Orang/bulan	4,050,000,000.00	44 Orang/bulan	3,566,787,400.00	47 Orang/bulan	3,419,767,000.00	50 Orang/bulan	3,574,937,900.00	50 Orang/bulan	3,586,183,500.00	54 Orang/bulan	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
Output : Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	61,866,600.00	12 Dokumen	60,012,000.00	12 Dokumen	201,600,000.00	12 Dokumen	201,600,000.00	12 Dokumen	213,600,000.00	12 Dokumen	213,600,000.00	12 Dokumen	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
Output : Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD															
Output : Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	13,414,600.00	12 Dokumen	12,500,000.00	12 Dokumen	13,000,000.00	12 Dokumen	14,000,000.00	12 Dokumen	15,000,000.00	12 Dokumen	15,500,000.00	12 Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
Output : Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2,501,000.00	2 Laporan	3,150,000.00	2 Laporan	3,300,000.00	2 Laporan	3,500,000.00	2 Laporan	3,750,000.00	2 Laporan	4,000,000.00	2 Laporan	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan															
Output : Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Activate Windows

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran															
Output : Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	6,869,550.00	12 Dokumen	5,900,000.00	12 Dokumen	6,200,000.00	12 Dokumen	6,500,000.00	12 Dokumen	6,800,000.00	12 Dokumen	7,000,000.00	12 Dokumen	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
Output : Tersusunnya Dokumen/Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Diselesaikan Tepat Waktu	Persentase Dokumen/Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	10,821,600.00	100%	3,800,000.00	100%	13,500,000.00	100%	14,300,000.00	100%	15,200,000.00	100%	16,000,000.00	100%	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah															
Output : Tersedianya Rencana Kebutuhan BMD SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SJKPD															
Output : Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	2 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD															
Output : Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10,821,600.00	1 Laporan	3,800,000.00	1 Laporan	13,500,000.00	1 Laporan	14,300,000.00	1 Laporan	15,200,000.00	1 Laporan	16,000,000.00	1 Laporan	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
Output : Tersedianya Pegawai ASN yang Memiliki Predikat Kinerja Sangat Baik	Persentase ASN yang Memiliki Predikat Kinerja Sangat Baik	100%	8,420,100.00	100%	5,972,500.00	100%	11,800,000.00	100%	12,400,000.00	100%	13,000,000.00	100%	13,600,000.00	100%	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
Output : Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian															
Output : Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	8,420,100.00	1 Dokumen	5,972,500.00	1 Dokumen	11,800,000.00	1 Dokumen	12,400,000.00	1 Dokumen	13,000,000.00	1 Dokumen	13,600,000.00	1 Dokumen	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian															
Output : Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai															
Output : Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam Melaksanakan Tugas															
Output : Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
Output : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	3 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan															
Output : Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah															
Output : Tersusunnya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	286,202,000.00	100%	582,706,000.00	100%	633,800,000.00	100%	636,904,900.00	100%	695,000,000.00	100%	729,300,000.00	100%	

Activate Windows

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Administrasi Umum Perangkat Daerah															
Output : Tersusunnya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	286,202,000.00	100%	582,706,000.00	100%	633,800,000.00	100%	636,904,900.00	100%	695,000,000.00	100%	729,300,000.00	100%	
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor															
Output : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 Paket	6,256,500.00	1 Paket	8,709,000.00	1 Paket	9,000,000.00	1 Paket	9,300,000.00	1 Paket	9,600,000.00	1 Paket	10,000,000.00	1 Paket	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
Output : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7,345,000.00	7 Paket	44,565,000.00	7 Paket	70,000,000.00	7 Paket	72,000,000.00	7 Paket	74,000,000.00	7 Paket	77,000,000.00	7 Paket	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
Output : Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
Output : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	9,316,500.00	3 Paket	23,576,000.00	3 Paket	22,000,000.00	3 Paket	24,000,000.00	3 Paket	26,000,000.00	3 Paket	29,000,000.00	3 Paket	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
Output : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	2,380,000.00	5 Dokumen	5,620,000.00	5 Dokumen	6,300,000.00	5 Dokumen	6,800,000.00	5 Dokumen	7,300,000.00	5 Dokumen	7,800,000.00	5 Dokumen	
Penyediaan Bahan Material															
Output : Tersedianya Bahan Material	Jumlah Paket Bahan Material yang tersedia	3 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fasilitasi Kunjungan Tamu															
Output : Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
Output : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	139,824,000.00	12 Laporan	377,236,000.00	12 Laporan	396,000,000.00	12 Laporan	388,804,900.00	12 Laporan	436,600,000.00	12 Laporan	458,500,000.00	12 Laporan	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD															
Output : Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	6,080,000.00	1 Dokumen	8,000,000.00	1 Dokumen	10,500,000.00	1 Dokumen	11,000,000.00	1 Dokumen	11,500,000.00	1 Dokumen	12,000,000.00	1 Dokumen	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD															
Output : Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	115,000,000.00	12 Dokumen	115,000,000.00	12 Dokumen	120,000,000.00	12 Dokumen	125,000,000.00	12 Dokumen	130,000,000.00	12 Dokumen	135,000,000.00	12 Dokumen	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
Output : Tersedianya Barang Milik Daerah yang menjadi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang menjadi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan															
Output : Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	25 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
Output : Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengadaan Mebel															
Output : Tersedianya mebel kantor	Jumlah Paket mebel yang disediakan	2 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Activate Windows

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengadaan Aset Tak Berwujud															
Output : Tersedianya Aset tak berwujud	JumlahUnit Aset Tak Berwujud yang disediakan	2 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Output : Tersusunnya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	114,862,650.00	100%	286,056,600.00	100%	131,100,000.00	100%	138,250,000.00	100%	144,500,000.00	100%	150,100,000.00	100%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
Output : Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	8,810,300.00	1 Laporan	13,000,000.00	1 Laporan	14,000,000.00	1 Laporan	15,000,000.00	1 Laporan	16,000,000.00	1 Laporan	17,000,000.00	1 Laporan	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
Output : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	92,342,350.00	12 Laporan	92,338,600.00	12 Laporan	96,000,000.00	12 Laporan	100,800,000.00	12 Laporan	104,600,000.00	12 Laporan	107,500,000.00	12 Laporan	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
Output : Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	4,350,000.00	2 Laporan	10,030,000.00	2 Laporan	11,100,000.00	2 Laporan	11,700,000.00	2 Laporan	12,400,000.00	2 Laporan	13,100,000.00	2 Laporan	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
Output : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	9,360,000.00	3 Laporan	170,688,000.00	3 Laporan	10,000,000.00	3 Laporan	10,750,000.00	3 Laporan	11,500,000.00	3 Laporan	12,500,000.00	3 Laporan	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Output : Tersusunnya Barang Milik Daerah Dalam Keadaan Baik	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Keadaan Baik	100%	95,540,000.00	100%	151,131,000.00	100%	137,000,000.00	100%	140,000,000.00	100%	145,000,000.00	100%	150,000,000.00	100%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															

Activate Windows

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
Output : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
Output : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	95,540,000.00	75 Unit	101,180,000.00	27 Unit	105,000,000.00	27 Unit	108,000,000.00	28 Unit	110,000,000.00	28 Unit	112,000,000.00	29 Unit	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
Output : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	3 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud															
Output : Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	2 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
Output : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	49,951,000.00	1 Unit	32,000,000.00	1 Unit	32,000,000.00	1 Unit	35,000,000.00	1 Unit	38,000,000.00	1 Unit	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
Output : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	

Activate Windows

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
KEPEGAWAIAN			**589,197,500.00**		**843,276,000.00**		**506,225,500.00**		**497,913,100.00**		**470,488,600.00**		**479,724,100.00**		
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			**589,197,500.00**		**843,276,000.00**		**506,225,500.00**		**497,913,100.00**		**470,488,600.00**		**479,724,100.00**		
Outcome : Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur	**Persentase aparatur yang berkinerja baik dan/atau sangat baik**	**93.33%**				**94%**		**94%**		**95%**		**95%**		**95%**	
Meningkatnya Kompetensi ASN Sesuai Dengan Jabatan	**Persentase ASN yang memiliki Kompetensi sesuai dengan Jabatan**	**93.20%**				**94%**		**95%**		**95%**		**96%**		**96%**	
Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	**Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Anjab/ABK**	**100%**				**95%**		**95%**		**95%**		**95%**		**95%**	
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN															
Output : Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100%	198,280,000.00	100%	247,940,000.00	100%	163,000,000.00	100%	163,000,000.00	100%	155,000,000.00	100%	158,235,500.00	100%	
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN															
Output : Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	19,000,000.00	1 Dokumen	19,000,000.00	1 Dokumen	12,000,000.00	1 Dokumen	12,000,000.00	1 Dokumen	12,000,000.00	1 Dokumen	12,235,500.00	1 Dokumen	
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK															
Output : Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	6 Dokumen	89,280,000.00	5 Dokumen	120,000,000.00	5 Dokumen	68,000,000.00	5 Dokumen	68,000,000.00	5 Dokumen	63,000,000.00	5 Dokumen	66,000,000.00	5 Dokumen	
Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN															
Output : Terlaksananya Evaluasi Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	20,000,000.00	1 Laporan	31,000,000.00	1 Laporan	20,000,000.00	1 Laporan	20,000,000.00	1 Laporan	20,000,000.00	1 Laporan	20,000,000.00	1 Laporan	

Activate Windows

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian															
Output : Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	10,000,000.00	1 Dokumen	19,000,000.00	3 Dokumen	10,000,000.00	3 Dokumen	10,000,000.00	3 Dokumen	10,000,000.00	3 Dokumen	10,000,000.00	3 Dokumen	
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN															
Output : Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	10,000,000.00	1 Lembaga	20,940,000.00	1 Lembaga	10,000,000.00	1 Lembaga	10,000,000.00	1 Lembaga	10,000,000.00	1 Lembaga	10,000,000.00	1 Lembaga	
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian															
Output : Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengelolaan Data Kepegawaian															
Output : Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 Dokumen	25,000,000.00	12 Dokumen	20,000,000.00	4 Dokumen	20,000,000.00	4 Dokumen	20,000,000.00	4 Dokumen	20,000,000.00	4 Dokumen	20,000,000.00	4 Dokumen	
Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian															
Output : Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	25,000,000.00	1 Laporan	18,000,000.00	1 Laporan	23,000,000.00	1 Laporan	23,000,000.00	1 Laporan	20,000,000.00	1 Laporan	20,000,000.00	1 Laporan	
Mutasi dan Promosi ASN															
Output : Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Mutasi dan Promosi ASN	100%	220,917,500.00	100%	271,978,500.00	100%	177,949,500.00	100%	177,949,500.00	100%	166,488,600.00	100%	169,488,600.00	100%	
Pengelolaan Mutasi ASN															
Output : Terlaksananya Mutasi ASN yang meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	80,000,000.00	1 Dokumen	70,888,500.00	5 Dokumen	60,000,000.00	5 Dokumen	60,000,000.00	5 Dokumen	56,488,600.00	6 Dokumen	59,488,600.00	6 Dokumen	
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN															
Output : Terlaksananya pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	700 Dokumen	85,917,500.00	700 Dokumen	100,415,000.00	700 Dokumen	67,949,500.00	720 Dokumen	67,949,500.00	740 Dokumen	62,000,000.00	740 Dokumen	62,000,000.00	760 Dokumen	

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Pengelolaan Promosi ASN															
Output : Terlaksananya pengelolaan pengembangan promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	55,000,000.00	1 Dokumen	100,675,000.00	2 Dokumen	50,000,000.00	2 Dokumen	50,000,000.00	2 Dokumen	48,000,000.00	2 Dokumen	48,000,000.00	2 Dokumen	
Pengembangan Kompetensi ASN															
Output : Terlaksananya pengembangan kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	100%	120,000,000.00	100%	233,422,300.00	100%	115,276,000.00	100%	106,963,600.00	100%	101,000,000.00	100%	102,000,000.00	100%	
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN															
Output : Meningkatnya Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat Kapasitasnya	5 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengelolaan Assesment Centre															
Output : Terkelolanya Assesment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assesment Center	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN															
Output : Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	10 Orang	105,000,000.00	10 Orang	197,889,800.00	9 Orang	100,276,000.00	8 Orang	91,963,600.00	8 Orang	86,000,000.00	8 Orang	87,000,000.00	5 Orang	
Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN															
Output : Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan	10 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional															
Output : Tersedianya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	1 Dokumen	15,000,000.00	1 Dokumen	35,532,500.00	2 Dokumen	15,000,000.00	2 Dokumen	15,000,000.00	2 Dokumen	15,000,000.00	2 Dokumen	15,000,000.00	2 Dokumen	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN															
Output : Terlaksananya Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah dokumen hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fasilitasi Pengembangan Karir Dalam Jabatan Fungsional															
Output : Meningkatnya Karir ASN Jabatan fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	5 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional															
Output : Terlaksananya Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur															
Output : Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100%	50,000,000.00	100%	89,935,200.00	100%	50,000,000.00	100%	50,000,000.00	100%	48,000,000.00	100%	50,000,000.00	100%	
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur															
Output : Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	10,000,000.00	Dokumen	25,787,500.00	2 Dokumen	10,000,000.00	2 Dokumen	10,000,000.00	2 Dokumen	10,000,000.00	2 Dokumen	10,000,000.00	2 Dokumen	
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai															
Output : Terlaksananya Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi ASNi	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	5 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur															
Output : Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	1 Dokumen	20,000,000.00	1 Dokumen	43,944,500.00	2 Dokumen	20,000,000.00	2 Dokumen	20,000,000.00	2 Dokumen	19,000,000.00	2 Dokumen	20,000,000.00	2 Dokumen	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pembinaan Disiplin ASN															
Output : Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	3 Orang	20,000,000.00	3 Orang	20,203,200.00	38 Orang	20,000,000.00	38 Orang	20,000,000.00	38 Orang	19,000,000.00	38 Orang	20,000,000.00	38 Orang	
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN															
Output : Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai															
Output : Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses izin perceraian pegawai yang dilayani	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			**441,269,500.00**		**1,203,722,500.00**		**427,158,700.00**		**432,797,600.00**		**442,448,100.00**		**465,032,900.00**		
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			**441,269,500.00**		**1,203,722,500.00**		**427,158,700.00**		**432,797,600.00**		**442,448,100.00**		**465,032,900.00**		
Outcome : Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional	**Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional**	**66%**				**40%**		**45%**		**50%**		**55%**		**60%**	
Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial	**Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial**	**49.79%**				**50%**		**55%**		**60%**		**65%**		**70%**	
Pengembangan Kompetensi Teknis															
Output : Terlaksananya Kebijakan Teknis Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Berbasis Tupoksi	Persentase Penyusunan Kebijakan Teknis Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Berbasis Tupoksi	100%	81,809,200.00	100%	250,000,000.00	100%	77,158,700.00	100%	77,158,700.00	100%	81,809,200.00	100%	85,394,000.00		
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum															

Activate Windows

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum															
Output : Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang disusun	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintah Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum															
Output : Tersusunya Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintah Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintah Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang disusun	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum															
Output : Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	28 Orang	81,809,200.00	28 Orang	250,000,000.00	20	77,158,700.00	20 Orang	77,158,700.00	25 Orang	81,809,200.00	23 Orang	85,394,000.00	20 Orang	

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum															
Output : Terlaksananya Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional															
Output : Terselenggaranya Pemetaan dan Evaluasi Kompetensi Jabatan Pengawas	Pelaksanaan Pemetaan dan Evaluasi Kompetensi Jabatan Pengawas	1 Kali	359,460,300.00	1 Kali	953,722,500.00	1 Kali	350,000,000.00	1 Kali	355,638,900.00	1 Kali	360,638,900.00	1 Kali	379,638,900.00	1 Kali	
Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional															
Output : Tersusunya Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang disusun	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan															
Output : Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	359,460,300.00	1 Laporan	953,722,500.00	1 Laporan	350,000,000.00	1 Laporan	355,638,900.00	1 Laporan	360,638,900.00	1 Laporan	379,638,900.00	1 Laporan	

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Tabel 4.3
Daftar SubKegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	Peningkatan Kualitas SDM Aparatur	Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur	Pengembangan Kompetensi Teknis (Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum)	
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Pembinaan Disiplin ASN)	
			Mutasi dan Promosi ASN (Pengelolaan Mutasi ASN dan Pengelolan Promosi ASN)	
			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN (Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK)	

Berdasarkan Program Prioritas BKPSDM, terdapat beberapa fokus pembangunan yang disertai rencana aksi, yaitu :

- Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta keimanan dan ketakwaan (IMTAK) Aparatur dengan rencana aksi, yaitu :
  - Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi yang mendukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Keimanan dan Ketakwaan (IMTAK) Aparatur;
  - Penentuan kebutuhan peningkatan kualitas SDM aparatur yang ditentukan melalui usulan prioritas pemenuhan kesenjangan kompetensi;
  - Pelaksanaan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam upaya Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Keimanan dan Ketakwaan (IMTAK) Aparatur;
  - Pelaksanaan kerjasama antar instansi, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dalam rangka keberlanjutan, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Keimanan dan Ketakwaan (IMTAK) Aparatur
- Peningkatan kualitas SDM Aparatur berbasis tupoksi dengan rencana aksi, yaitu :
  - Identifikasi Perangkat Daerah yang menjalankan Program Prioritas Visi Kabupaten Kepulauan Selayar, Perangkat Daerah yang menjalankan Urusan Pemerintahan Wajib dan Perangkat daerah yang menjalankan urusan penunjang urusan pemerintahan wajib
  - Penentuan kebutuhan peningkatan kualitas SDM aparatur yang ditentukan melalui analisa kesenjangan berdasarkan tugas pokok dan fungsi

- Penyusunan dokumen kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan formal, pengembangan kompetensi, serta pengalaman kerja dengan rencana peningkatan kualitas SDM aparatur berdasarkan tugas pokok dan fungsi
- Pelaksanaan uji kompetensi, sertifikasi dan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan manajerial, teknis, sosio-kultural dan pendidikan lanjutan yang diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan pemerintahan secara profesionalisme, berdayaguna dan berhasilguna yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi
- Pelaksanaan kerjasama antar instansi, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dalam rangka keberlanjutan, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan sistem peningkatan kualitas SDM aparatur berbasis tugas pokok dan fungsi

➢ Pengembangan budaya kerja berbasis kinerja dengan rencana aksi, yaitu :

- Membentuk Tim Budaya Kerja ASN
- Mengidentifikasi budaya kerja ASN dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung program kerja Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar periode 2025 s.d 2030
- Membangun komitmen dalam pencapaian tujuan organisasi dengan menginplementasikann nilai-nilai dasar budaya kerja ASN yaitu profesional, integritas, disiplin, inovatif, responsibilitas dan sinergitas
- Penerapan budaya kerja ASN dengan berorientasi pada hasil

- Monitoring penerapan budaya kerja ASN
- Menganalisis kendala yang dihadapi oleh ASN dalam penerapan budaya kerja ASN
- Melaksanakan pembinaan budaya kerja ASN
- Evaluasi dan tindak lnjut budaya kerja ASN

- Pembinaan karakter Aparatur berbasis integritas dengan rencana aksi, yaitu :
  - Penguatan Pemahaman Integritas bagi Seluruh Pegawai ASN
  - Peningkatan Kepemimpinan yang Berintegritas
  - Pengawasan Internal dan Evaluasi Kinerja Pegawai ASN
  - Penguatan Sistem Akuntabilitas dan Pelaporan Kinerja, Keuangan dan Administrasi
  - Pembentukan Tim Pembinaan Karakter Pegawai ASN
- Peningkatan fasilitas kerja berbasis beban kerja dengan rencana aksi, yaitu :
  - Mengumpulkan Data Pejabat, Data Pegawai dan Peta Jabatan dari masing-masing Perangkat Daerah
  - Memastikan seluruh data pegawai lengkap dan update
  - Mengidentifikasi Jabatan yang kosong di setiap Perangkat Daerah termasuk sekolah dan unit pelayanan masyarakat
  - Menganalisa kesesuaian antara kompetensi dan tupoksi
  - Melakukan Rapat Tim Penilai Kinerja Pegawai
  - Melakukan mutasi dan rotasi penempatan pegawain sesuai dengan bidang keahlian kompetensi dan kebutuhan organisasi
  - Melakukan pemantauan dan evaluasi pada proses mutase dan rotasi penemapatan pegawai
  - Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Program

- Pendistribusian pegawai berbasis kompetensi dengan rencana aksi, yaitu :
  - Menyusun dokumen usulan penerbitan NI CPNS dan PPPK
  - Melakukan penginputan dokumen usulan penerbitan NI CPNS dan NI PPPK ke dalam aplikasi SIASN
  - Menyerahkan SK CPNS dan SK PPPK
- Penyiapan SDM Aparatur pada "Pemekaran Daerah" dengan rencana aksi, yaitu :
  - Membuat Dokumen tentang hasil seleksi administrasi pengadaan ASN
  - Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan ujian seleksi kompetensi penerimaan ASN
  - Membuat pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat pelaksanaan seleksi kompetensi penerimaan ASN
  - Pelaksanaan Seleksi Kompetensi dan Seleksi Bidang ASN
  - Membuat pengumuman hasil akhir ujian seleksi kompetensi penerimaan ASN PPPK

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Sebagai komitmen untuk pendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD, kinerja penyelenggaraan mengukur keberhasilan BKPSDM dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra. Ruang lingkup tugas yang menjadi kewenangan BKPSDM, seperti manajemen ASN, pengembangan kompetensi, pengelolaan kinerja dan pembinaan disiplin**.**

Penerapan teknologi informasi, khususnya pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang semakin terintegrasi, pelaksanaan diklat berbasis e-learning,

serta penyesuaian proses bisnis layanan kepegawaian agar lebih efisien.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain: keterbatasan kapasitas infrastruktur digital, kebutuhan penyelarasan data kepegawaian antar-perangkat daerah, serta pemerataan kesempatan pengembangan kompetensi bagi seluruh ASN. Untuk itu, BKPSDM akan terus melakukan inovasi layanan, meningkatkan sinergi antar-stakeholder dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital guna memastikan peningkatan kualitas manajemen ASN secara berkelanjutan.

Dengan capaian dan langkah perbaikan tersebut, BKPSDM meyakini bahwa sasaran strategis Renstra dapat tercapai secara optimal, sehingga mendukung terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional, kompeten dan berintegritas dalam rangka pelayanan publik yang berkualitas.

TABEL 4.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

NO	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE*	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Profesionalitas ASN	%	78,46%	78,48	78,50	78,52	78,54	78,56	79	
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori	B	B	B	B	B	B	B	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	%	78,51%	79	80	81	82	83	84	

TABEL 4.5
INDIKATOR KINERJA KUNCI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

NO	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE*	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase aparatur yang berkinerja baik dan/atau sangat baik	Persen	93,33	94	94	94	95	95	95	
	Persentase ASN yang Memiliki Kompetensi Sesuai dengan Jabatan	Persen	93,2	93,5	94	95	95	96	96	
	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Anjab/ABK	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis dan fungsional	Persen	66	35	40	45	50	55	60	
	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar dan manajerial	Persen	49,79	45	50	55	60	65	70	

BAB V
PENUTUP

Renstra BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar yang disusun dengan memperhatikan RPMJD mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 dimaksud sebagai dokumen perencanaan strategis BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan penajabaran program BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar 2025-2029 dan diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar untuk tahun 2025-2029.

Selain itu, penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar 2025-2029 merupakan rencana yang masih bersifat strategis dan indikatif, sehingga masih diperlukan penjabaran secara teknis operasional setiap tahunnya sebagai upaya yang berkesinambungan dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun. Penjabaran ini berupa Rencana Kerja Tahunan yang disesuaikan dengan pagu indikatif program kegiatan yang telah ditentukan di RPJMD dan Renstra. Penyusunan Renstra merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian yang selanjutnya akan dijabarkan kedalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang konkrit, terarah dan transparan dalam usulan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Pelaksanaan Renstra BKPSDM 2025-2029 menjadi tanggung jawab Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sehingga target yang akan dicapai perlu dipertimbangkan dengan target yang ada di RPJMD serta pagu indikatif yang telah ditetapkan. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra BKPSDM 2025-2029 dilaksanakan secara bersama oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Kepulauan Selayar.

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berisikan pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengembangan tidak terlepas dalam penguatan peran para *stakeholders* yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat sehingga dalam pelaksanaan Rencana Kinerja BKPSDM menjadi dasar Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Atas Kinerja Tahunan serta program dan kegiatan yang direncanakan merupakan program kegiatan yang melibatkan semua pihak.

Demikian Renstra BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029 semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan sasaran dan kegiatan di tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Benteng, 25 September 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,



ANDI TRIYANTI MUSDALIFAH, SE., M.M
Pangkat : Pembina
NIP.19780520 200604 2 036

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MUHAMMAD NATSIR ALI

LAMPIRAN XXV
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025-2029

PEMETAAN VISI, MISI, PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

VISI	KATA KUNCI VISI	MISI		ASTA CITA	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM KERJA	KEGIATAN
BERSAMA MEMBAWA SELAYAR MAJU & SEJAHTERA	**MAJU**	1	Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba		Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur	Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta keimanan dan ketakwaan (IMTAK) Aparatur

PROGRAM PERMENDAGRI NOMOR 90	PERANGKAT DAERAH	RENCANA AKSI	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM	1. Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi yang mendukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Keimanan dan Ketakwaan (IMTAK) Aparatur; 2. Penentuan kebutuhan peningkatan kualitas SDM aparatur yang ditentukan melalui usulan prioritas pemenuhan kesenjangan kompetensi; 3. Pelaksanaan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam upaya Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Keimanan dan Ketakwaan (IMTAK) Aparatur;	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyusunan Kebijakan Teknis Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Berbasis Tupoksi	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

PROGRAM PERMENDAGRI NOMOR 90	PERANGKAT DAERAH	RENCANA AKSI	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		4.Pelaksanaan kerjasama antar instansi, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dalam rangka keberlanjutan, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Keimanan dan Ketakwaan (IMTAK) Aparatur			

INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027	
	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	28 Orang	188,338,400.00	105 Orang	250,000,000.00	106 Orang	77,158,700.00

TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
107 Orang	77,158,700.00	109 Orang	81,809,200.00	110 Orang	85,394,000.00

VISI	KATA KUNCI VISI	MISI		ASTA CITA	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM KERJA	KEGIATAN
							Peningkatan kualitas SDM Aparatur berbasis tupoksi

PROGRAM PERMENDAGRI NOMOR 90	PERANGKAT DAERAH	RENCANA AKSI	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM	1. Identifikasi Perangkat Daerah yang menjalankan Program Prioritas Visi Kabupaten Kepulauan Selayar, Perangkat Daerah yang menjalankan Urusan Pemerintahan Wajib dan Perangkat daerah yang menjalankan urusan penunjang urusan pemerintahan wajib	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyusunan Kebijakan Teknis Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Berbasis Tupoksi	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
		2.Penentuan kebutuhan peningkatan kualitas SDM aparatur yang ditentukan melalui analisa kesenjangan berdasarkan tugas pokok dan fungsi			

PROGRAM PERMENDAGRI NOMOR 90	PERANGKAT DAERAH	RENCANA AKSI	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		3.Penyusunan dokumen kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan formal, pengembangan kompetensi, serta pengalaman kerja dengan rencana peningkatan kualitas SDM aparatur berdasarkan tugas pokok dan fungsi			
		4.Pelaksanaan uji kompetensi, sertifikasi dan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan manajerial, teknis, sosio-kultural dan pendidikan lanjutan yang diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan pemerintahan secara profesionalisme, berdayaguna dan berhasilguna yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi			

Activate Windows
Go to Settings to activate

PROGRAM PERMENDAGRI NOMOR 90	PERANGKAT DAERAH	RENCANA AKSI	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		5.Pelaksanaan kerjasama antar instansi, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dalam rangka keberlanjutan, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan sistem peningkatan kualitas SDM aparatur berbasis tugas pokok dan fungsi			

INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027	
	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	3 Orang	4,457,200.00	38 Orang	20,203,200.00	38 Orang	20,000,000.00

TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
38 Orang	20,000,000.00	38 Orang	19,000,000.00	38 Orang	20,000,000.00

VISI	KATA KUNCI VISI	MISI		ASTA CITA	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM KERJA	KEGIATAN
							Pengembangan budaya kerja berbasis kinerja

PROGRAM PERMENDAGRI NOMOR 90	PERANGKAT DAERAH	RENCANA AKSI	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM	1.Membentuk Tim Budaya Kerja ASI	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pembinaan Disiplin ASN
		2.Mengidentifikasi budaya kerja ASN dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung program kerja Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar periode 2025 s.d 2030			
		3.Membangun komitmen dalam pencapaian tujuan organisasi dengan menginplementasikann nilai-nilai dasar budaya kerja ASN yaitu profesional, integritas, disiplin, inovatif, responsibilitas dan sinergitas			
		4.Penerapan budaya kerja ASN dengan berorientasi pada hasil			
		5.Monitoring penerapan budaya kerja ASN			
		6.Menganalisis kendala yang dihadapi oleh ASN dalam penerapan budaya kerja ASN			
		7.Melaksanakan pembinaan budaya kerja ASN			
		8.Evaluasi dan tindak lnjut budaya kerja ASN			

Activate Windows
Go to Settings to activate

INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027	
	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	3 Orang	4,457,200.00	38 Orang	20,203,200.00	38 Orang	20,000,000.00

TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
38 Orang	20,000,000.00	38 Orang	19,000,000.00	38 Orang	20,000,000.00

VISI	KATA KUNCI VISI	MISI	ASTA CITA	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM KERJA	KEGIATAN
						Pembinaan karakter Aparatur berbasis integritas

PROGRAM PERMENDAGRI NOMOR 90	PERANGKAT DAERAH	RENCANA AKSI	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM	1.Penguatan Pemahaman Integritas bagi Seluruh Pegawai ASN	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur
		2.Peningkatan Kepemimpinan yang Berintegritas			
		3.Pengawasan Internal dan Evaluasi Kinerja Pegawai ASN			
		4.Penguatan Sistem Akuntabilitas dan Pelaporan Kinerja, Keuangan dan Administrasi			
		5.Pembentukan Tim Pembinaan Karakter Pegawai ASN			

INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027	
	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur			2 Dokumen	25,787,500.00	2 Dokumen	10,000,000.00

TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
2 Dokumen	10,000,000.00	2 Dokumen	10,000,000.00	2 Dokumen	10,000,000.00

VISI	KATA KUNCI VISI	MISI		ASTA CITA	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM KERJA	KEGIATAN
							Peningkatan fasilitas kerja berbasis beban kerja.

PROGRAM PERMENDAGRI NOMOR 90	PERANGKAT DAERAH	RENCANA AKSI	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM	1.Mengumpulkan Data Pejabat, Data Pegawai dan Peta Jabatan dari masing-masing Perangkat Daerah	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase mutasi dan promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN
		2.Memastikan seluruh data pegawai lengkap dan update			
		3. Mengidentifikasi Jabatan yang kosong di setiap Perangkat Daerah termasuk sekolah dan unit pelayanan masyarakat			
		4.Menganalisa kesesuaian antara kompetensi dan tupoksi			Pengelolaan Promosi ASN
		5.Melakukan Rapat Tim Penilai Kinerja Pegawai			
		6.Melakukan mutasi dan rotasi penempatan pegawain sesuai dengan bidang keahlian kompetensi dan kebutuhan organisasi			
		7.Melakukan pemantauan dan evaluasi pada proses mutase dan rotasi penemapatan			
		8.Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Program			

INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027	
	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	29,396,400.00	5 Dokumen	70,888,500.00	5 Dokumen	60,000,000.00
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	230,891,000.00	2 Dokumen	100,675,000.00	2 Dokumen	50,000,000.00

Activate Windo

TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
TARGET	**Rp.**	**TARGET**	**Rp.**	**TARGET**	**Rp.**
5 Dokumen	60,000,000.00	6 Dokumen	56,488,600.00	6 Dokumen	59,488,600.00
2 Dokumen	50,000,000.00	2 Dokumen	48,000,000.00	2 Dokumen	48,000,000.00

VISI	KATA KUNCI VISI	MISI		ASTA CITA	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM KERJA	KEGIATAN
							Pendistribusian pegawai berbasis kompetensi (Pengusulan dan Penerbitan SK CPNS dan SK PPPK)
							Penyiapan SDM Aparatur pada "Pemekaran Daerah" (Koordinasi dan fasilitasi pengadaan ASN)

PROGRAM PERMENDAGRI NOMOR 90	PERANGKAT DAERAH	RENCANA AKSI	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM	1.Menyusun dokumen usulan penerbitan NI CPNS dan PPPK 2.Melakukan penginputan dokumen usulan penerbitan NI CPNS dan NI PPPK ke dalam aplikasi SIASN 3.Menyerahkan SK CPNS dan SK PPPK	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM	1.Membuat Dokumen tentang hasil seleksi administrasi pengadaan ASN 2.Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan ujian seleksi kompetensi penerimaan ASN 3.Membuat pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat pelaksanaan seleksi kompetensi penerimaan ASN 4.Pelaksanaan Seleksi Kompetensi dan Seleksi Bidang ASN 5.Membuat pengumuman hasil akhir ujian seleksi kompetensi penerimaan ASN PPPK	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK

Activate Windows
Go to Settings to activate

INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027	
	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	5 Dokumen	81,869,700.00	5 Dokumen	120,000,000.00	5 Dokumen	68,000,000.00
Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	5 Dokumen	81,869,700.00	5 Dokumen	120,000,000.00	5 Dokumen	68,000,000.00

TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
5 Dokumen	68,000,000.00	5 Dokumen	63,000,000.00	5 Dokumen	66,000,000.00
5 Dokumen	68,000,000.00	5 Dokumen	63,000,000.00	5 Dokumen	66,000,000.00